

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS KESEHATAN**

**Kompleks Perkantoran Pemkab. Labuhanbatu Selatan
Desa Sosopan, Kecamatan Kotapinang
Emial : dinkes.labuselkab@gmail.com**

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik sesuai waktu yang telah ditentukan, walaupun dengan segala keterbatasan.

Penyusunan laporan kinerja ini guna memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang secara substantif mewajibkan semua instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja kepada publik atas tingkat pencapaian perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan hingga di masa mendatang.

Kami sadar bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di tahun-tahun mendatang. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pihak-pihak terkait yang berkepentingan dalam mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kotapinang, Maret 2024

**Pt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**


dr. BAKTI SUHENDRI NASUTION
PEMBINA Tk. I/ IV/b
NIP. 19770618 201001 1 010



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Kedudukan Tugas dan Fungsi	5
1.5 Struktur Organisasi	7
1.6 Aspek Strategis.....	9
1.7 Sistematika Laporan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis.....	11
2.2 Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja	17
3.2 Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2023.....	18
3.3 Realisasi Anggaran	25
BAB IV PENUTUP	
4.1 Simpulan Capaian Kinerja.....	32
4.2 Langkah Strategis Penguatan Capaian Kinerja Masa Mendatang.....	32
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjalankan pemerintahannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa pemberian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Secara teoritis, fungsi Pemerintah Daerah meliputi Pemberian pelayanan, Fungsi pengaturan, Fungsi Pembangunan, Fungsi perwakilan, Fungsi Koordinasi dan perencanaan.

Untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan tersebut, diperlukan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat selaku pemberi amanat serta pemilik kekuasaan dan kedaulatan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Review Atas Laporan Kinerja. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.



2.1 Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 Indonesia Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal Bidang Kesehatan;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024;

24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
30. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 – 2026;
31. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Tahun 2023, antara lain :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Mendorong Dinas Kesehatan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kesehatan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Kedudukan Tugas dan Fungsi

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengalami perubahan struktur organisasi yang dengan ditetapkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada April 2022. Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan mempunyai tugas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah kabupaten dalam lingkup kebijakan teknis, koordinasi, advokasi, pembinaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, sinkronisasi dan sinergisitas di bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan, penyusunan dan penyempurnaan, penetapan, pengaturan, pembinaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, fasilitasi, advokasi, pengawasan dan evaluasi kebijakan teknis pembangunan kesehatan tingkat provinsi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan tingkat kabupaten;
- b. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan pembinaan pembangunan kesehatan jangka menengah dan tahunan tingkat provinsi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan kesehatan Kabupaten terhadap perencanaan pembangunan kesehatan tingkat kabupaten;
- c. Penyelenggaraan koordinasi lintas sektor, lintas program dan kerjasama kemitraan dengan pihak terkait dalam pembangunan kesehatan tingkat kabupaten;
- d. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kecamatan dalam penanganan urusan pembangunan kesehatan di Kecamatan;
- e. Penyelenggaraan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural dan jabatan fungsional, serta standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja Dinas;
- f. Penyelenggaraan penataan pembinaan dan pengkoordinasian Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan eksternal dinas dan pelaksanaan penegakan hukum/hukum kesehatan;
- h. Penyelenggaraan pembinaan, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan dan pembangunan kesehatan tingkat kabupaten;
- i. Penyelenggaraan penetapan program kerja dan rencana kerja Dinas;

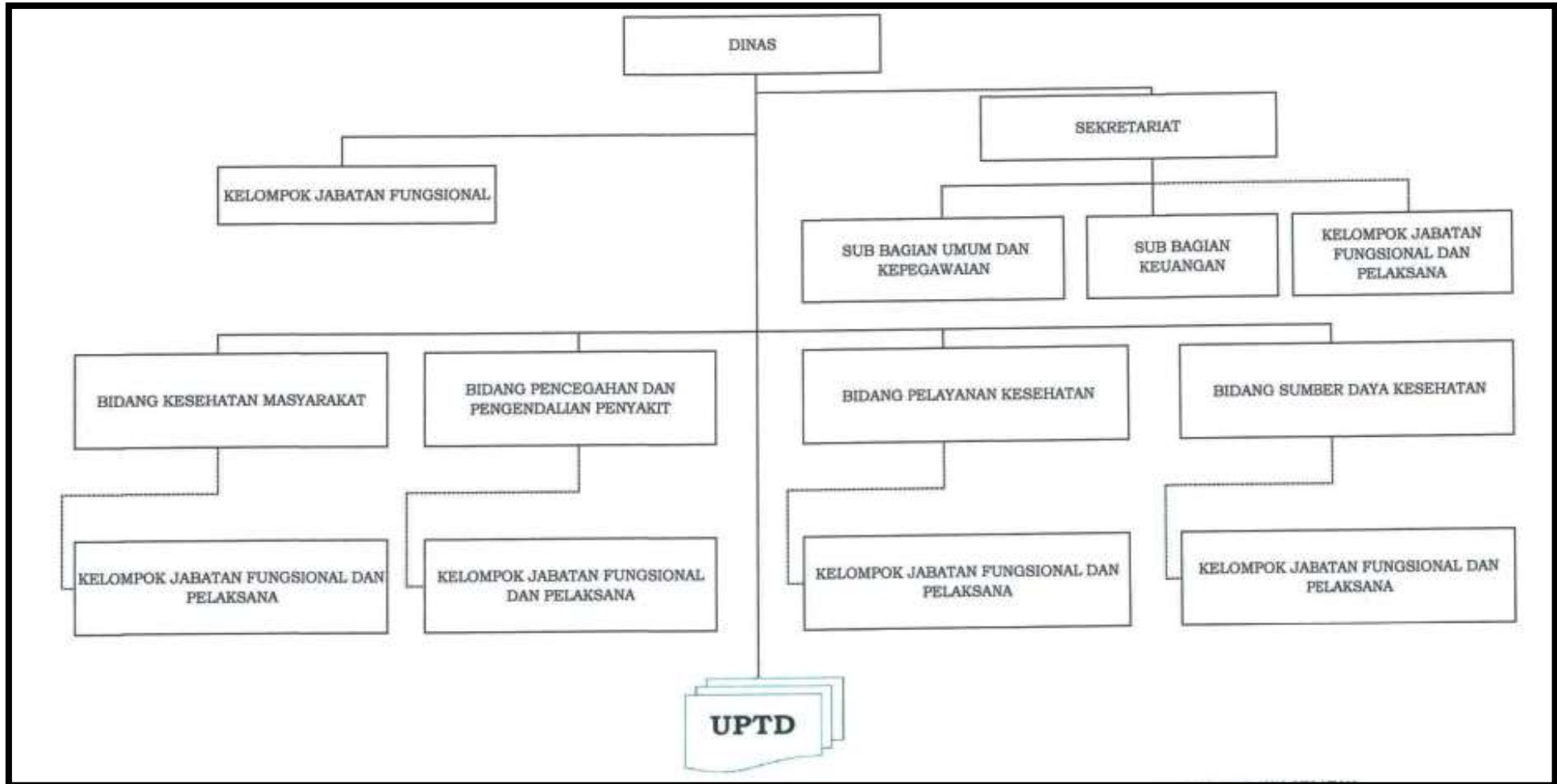
- j. Penyelenggaraan pengendalian Tugas dan Fungsi Dinas serta pengkoordinasian penyusunan tugas-tugas teknis;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- l. Pemberian masukan yang perlu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- m. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan yang ditetapkan.

1.5 Struktur Organisasi

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut maka melalui Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan ditetapkan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan



1.6 Aspek Strategis

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026, dimana dalam 6 (enam) misi Kepala Daerah, terdapat 1 (satu) yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yaitu misi ke-2 (dua) yang berbunyi “Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjamin/assurance, terjangkau, merata dan berkeadilan”. Misi Kepala Daerah tersebut kemudian menjadi dasar bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam mengambil peran strategis, sebagai berikut :

1. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas;
2. Peningkatan Keluarga Sadar Gizi (KADARZI);
3. Peningkatan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular;
4. Peningkatan pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui UKM dan UKP;
5. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
6. Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana sanitasi dasar yang sehat;
7. Optimalisasi manajemen publik dengan mengedepankan pelayanan prima.

1.7 Sistematika Laporan

Sistematika laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja, tugas dan fungsi, aspek strategis, dan sistematika penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Memuat gambaran singkat mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat hasil capaian kinerja rencana sasaran strategis; perbandingan target dan realisasi kinerja pada tahun berjalan, tahun lalu, dan beberapa tahun terakhir; perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah di dokumen perencanaan strategis; analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan; analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; analisis program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja; dan realisasi anggaran yang telah digunakan.

BAB IV PENUTUP

Memuat simpulan umum atas capaian kinerja serta langkah-langkah yang diambil untuk peningkatan kinerja ditahun berikutnya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 -2026 dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sebagai acuan pelaksanaan program serta menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan manifestasi komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026.

Dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026 disebutkan Visi Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah :

“Labuhanbatu Selatan Sejahtera dan Bermartabat”

dengan 6 (enam) misi Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan terdapat 1 (satu) yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yaitu misi ke-2 (dua) yang berbunyi

“Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjamin/assurance, terjangkau, merata dan berkeadilan”

Selanjutnya, untuk menjabarkan visi dan misi pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2021-2026, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang akan dicapai pada tahun 2026 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 disajikan pada tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1
Matriks Perencanaan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
		2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup / Usia harapan hidup	69,21	69,51	69,81	70,11	70,45
Sasaran : Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Ibu	69/100.000 KH	67/100.000 KH	65/100.000 KH	63/100.000 KH	61/100.000 KH
	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	3,81/ 1000 KH	3,78/ 1000 KH	3,75/ 1000 KH	3,72/ 1000 KH	3,69/ 1000 KH
	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	3,2/ 1000 KH	3,18/ 1000 KH	3,16/ 1000 KH	3,14/ 1000 KH	3,12/ 1000 KH
	Prevalensi Balita Gizi Kurang	7,30%	7,00%	6,80%	6,50%	6,20%
	Angka Kesakitan	12%	11%	10%	10%	9%

Dinas Kesehatan sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, mempunyai kewajiban menyusun rencana kerja bidang kesehatan untuk mendukung perencanaan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis dikarenakan merupakan penerjemahan

perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam perencanaan, program dan penganggaran tahunan.

Pada tahun 2023, Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan perubahan Rencana Kerja Tahun 2023, dimana dokumen Renja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2023 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk sasaran SKPD karena kelembagaannya berubah maka sasaran SKPD-nya disesuaikan agar dapat mendukung percepatan pencapaian target sasaran daerah, demikian juga untuk nomenklatur program dan kegiatan juga harus menyesuaikan dengan sasaran daerah maupun sasaran SKPD-nya. Dalam hal ini, faktor utama perubahan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ditujukan untuk mencapai target kinerja tahun 2023 yang telah ditetapkan. Perubahan Rencana Kerja lingkup Dinas Kesehatan terutama berupa pergeseran anggaran antar kegiatan, penambahan/penghapusan kegiatan, atau penambahan/pengurangan jumlah anggaran serta target dan indikator kinerja untuk menyesuaikan dengan upaya pencapaian target dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 harus sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, dimana arah kebijakan pembangunan nasional dalam Urusan Kesehatan dalam fokus pembangunan tersebut dijabarkan dalam fokus peningkatan kualitas SDM kesehatan yang dilakukan dengan peningkatan sistem kesehatan yang ditandai dengan pencapaian :

1. Prevelansi stunting (penduk dan sangat pendek) pada balita sebesar 17,5%;
2. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk;
3. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 71%;

Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun dengan tujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik; dan memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 –

2026, ditetapkan indikator kinerja yang harus dipenuhi dari sasaran strategis yang diemban, yaitu :

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	PD Pengampu Urusan Kesehatan

2.2 Perjanjian Kinerja

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026, maka Target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2023 mengalami 1 (satu) kali perubahan. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa *Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:*

- Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;*
- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan*
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.*

Tabel 2.2
Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2023
Setelah dilakukan perubahan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIAKTOR KINERJA	TARGET
1.	Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	67 /100.000KH
		Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	3,78/ 1000 KH
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	3,18/1000 KH
		Prevalensi Balita Gizi Kurang	7,0%
		Angka Kesakitan	11%

Adapun Defenisi operasional dan Formulasi perhitungan indikator kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Defenisi Operasional dan Formulasi Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional dan Formulasi
1.	Angka Kematian Ibu	<p>Kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri.</p> <p>Formulasi :</p> $\text{Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup} = \frac{\text{Jumlah kematian ibu di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$
2.	Angka Kematian Bayi	<p>Kematian yang terjadi pada bayi usia 0 - 11 bulan tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri</p> <p>Formulasi :</p> $\text{Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup} = \frac{\text{Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 1.000$
3.	Angka Kematian Balita	<p>Kematian yang terjadi pada bayi/anak usia 0 - 59 bulan (bayi + anak balita) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri</p> <p>Formulasi :</p> $\text{Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup} = \frac{\text{Jumlah balita usia 0-59 bulan (bayi+anak balita) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 1.000$
4.	Prevalensi Balita Gizi Kurang	<p>Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score kurang dari -3 SD</p> <p>Formulasi :</p> $\text{Persentase balita gizi kurang} = \frac{\text{Jumlah balita gizi kurang}}{\text{Jumlah balita yang diukur berat badan dan panjang/tinggi badan}} \times 100\%$
5.	Angka Kesakitan	<p>Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi</p>

No.	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional dan Formulasi
		<p>fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari.</p> <p>Formulasi :</p> $\text{Morbiditas} = \frac{\text{jumlah kasus baru penyakit atau penyakit dalam periode waktu tertentu}}{\text{jumlah individu dalam populasi}} \times 100\%$

Alokasi anggaran per program yang dimuat dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Tahun 2023 yang ditujukan untuk mencapai sasaran strategis dapat dilihat melalui tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran Program
Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.032.757.681	APBD
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	55.426.249.850	APBD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.639.478.759	APBD
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	62.139.869	APBD
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	924.435.340	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja menunjukkan sejauh mana instansi pemerintah memenuhi tugas dan mandat dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas juga menggambarkan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan tupoksi setiap instansi pemerintah dalam mencapai sasaran strategis. Kewajiban pertanggungjawaban disajikan melalui laporan kinerja yang berisi capaian kinerja.

3.1 Capaian Kinerja

Dalam laporan kinerja ini, skala nilai peringkat kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi capaian kinerja yang tidak memenuhi target 100% adalah skala yang mengacu pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2023 lebih baik dibandingkan pada tahun 2022 dengan adanya peningkatan capaian indicator kinerja angka kematian ibu dari ketegori rendah menjadi kaategori sangat tinggi pada tahun 2023, demikian juga dengan indikator kinerja angka kesakitan dari kategori rendah pada tahun 2022 menjadi kategori tinggi pada tahun 2023. Sedangkan 3 (tiga) indicator lainnya yaitu angka kematian bayi, angka kematian balita dan prevalensi balita gizi kurang tetap dalam kategori sangat tinggi pada tahun 2023, lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel berikut :

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023				Tahun 2022	
			Target	Realisasi	% Kinerja	Kategori	% Kinerja	Kategori
1	Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	67	25,43	263,47	Sangat Tinggi	60,38	Rendah
		Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	3,78	0,89	424,72	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	3,18	1,02	311,76	Sangat Tinggi	151,66	Sangat Tinggi
		Prevalensi Balita Gizi Kurang (%)	7,0	1,08	648,15	Sangat Tinggi	405,56	Sangat Tinggi
		Angka Kesakitan (%)	11,00	14,14	77,79	Tinggi	59,94	Rendah

3.2 Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2023

Hasil analisis capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2023 dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pencapaian sasaran **“Menurunnya angka kesakitan dan kematian”** dengan 5 (lima) indikator pada tahun 2023, yaitu :

1. Angka Kematian Ibu

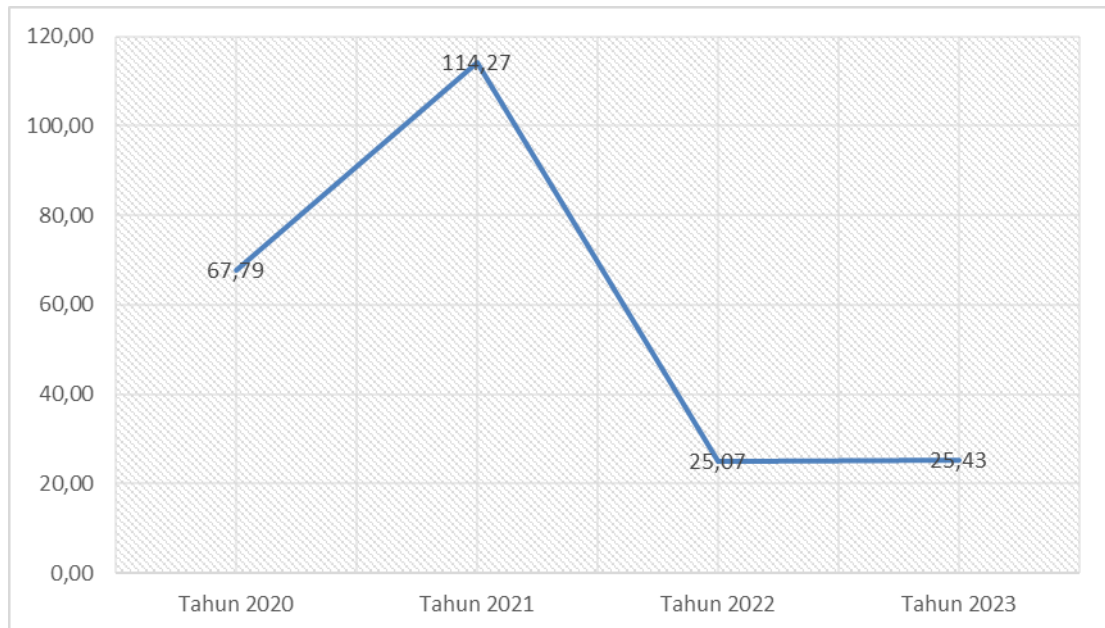
Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting derajat kesehatan masyarakat. Disebut demikian karena AKI dapat menunjukkan kemampuan dan kualitas layanan kesehatan.

Kematian ibu didefinisikan sebagai kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan atau dalam 42 hari setelah kehamilan, tidak tergantung dari lama dan lokasi kehamilan, disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut, atau penanganannya, akan tetapi bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan (WHO, 2015).

Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, angka kematian ibu pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2022 sedangkan jumlah kematian ibu tahun 2023 sebanyak 2 ibu mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2022 sebanyak 9 ibu.

Angka kematian ibu di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2023 adalah 25,43 per 100.000 kelahiran hidup. Ini artinya terdapat kematian ibu sebanyak 25 dari 100.000 kelahiran hidup. Berikut tren Angka Kematian Ibu (AKI) dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

Grafik Tren Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 – 2023



Kematian ibu hamil dan bersalin dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pendidikan dan pengetahuan, sosial budaya, sosial ekonomi, geografi dan lingkungan, aksesabilitas ibu pada fasilitas kesehatan serta kebijakan makro dalam kualitas pelayanan kesehatan.

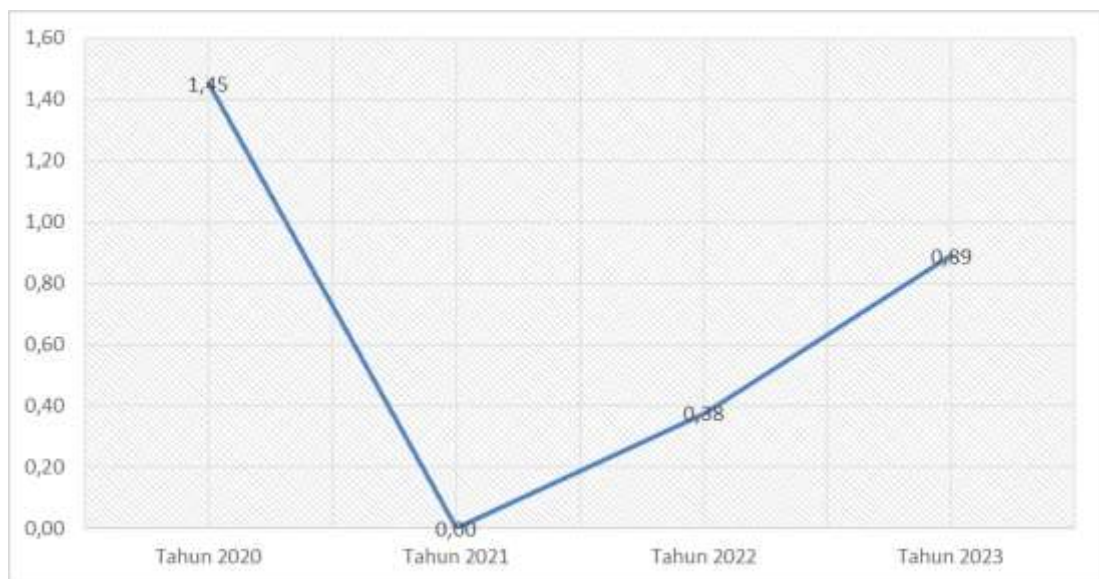
Untuk menekan angka kematian ibu melahirkan dalam proses persalinan, langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan antara lain meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui peningkatan mutu sarana dan prasarana kesehatan masyarakat seperti pengembangan dan pembangunan infrastruktur kesehatan masyarakat, meningkatkan kompetensi tenaga medis dan paramedis, membangun kesadaran masyarakat dalam menerapkan budaya hidup sehat, meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam menurunkan angka kematian ibu melahirkan dengan menggiatkan promosi kesehatan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan distribusi tenaga medis, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan melakukan pendataan dan mengevaluasi kinerja tenaga medis dan para medis serta melakukan pemetaan kebutuhan dan mengusulkan formasi pegawai (tenaga medis) kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat Kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya Kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi. Angka Kematian Bayi adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kematian bayi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 berfluktuasi, dimana pada tahun 2020 berada diangka 1,45/1.000KLH menurun pada tahun 2021 menjadi 0/1.000KLH dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 0,38/1.000KLH. Memasuki tahun 2023 kondisi tersebut kembali berubah dimana AKB di Kabupaten Labuhanbatu Selatan kembali naik diangka 0,89/1.000KLH.

Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan periode 2020-2023 dapat digambarkan dalam grafik dibawah ini :

**Grafik Tren Angka Kematian Bayi (AKB)
di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 – 2023**



Pergerakan yang tidak stabil pada Angka Kematian Bayi di atas dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pada tahun 2022 berdasarkan data yang dilaporkan dengan penyebab terbanyak adalah Asfiksia (terjadinya kegagalan bernafas secara spontan) pada Bayi baru lahir, masih kurangnya pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar, tidak adanya

peningkatan kapasitas bidan di desa-desa dalam tata laksana bayi baru lahir serta kurangnya pemahaman ibu dalam deteksi dini tanda bahaya janin. Masih ada budaya ibu dan bayi tidak boleh keluar rumah selama masa nifas dan keluarga tidak mengetahui tanda-tanda berbahaya pada bayi. Belum meratanya distribusi tenaga kesehatan di desa-desa. Selain itu perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan pendapatan masyarakat yang meningkat juga dapat berkontribusi melalui perbaikan gizi yang berdampak pada daya tahan terhadap infeksi penyakit sehingga dapat meningkatkan kesehatan anak yang pada akhirnya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap capaian indikator terkait kesehatan ibu dan anak ini antara lain :

- Program Perencanaan persalinan dan pencegahan Komplikasi (P4K)
- Kemitraan bidan dan dukun
- Kelas ibu hamil
- Kelas ibu balita
- Rumah tunggu kelahiran
- Pelayanan Antenatal Care Hipnoterapi
- Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
- Monitoring evaluasi dan supervise fasilitatif untuk memantau pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat puskesmas

3. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan jumlah kematian balita (0-5 tahun) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan KIA/ Posyandu, tingkat keberhasilan program KIA/ Posyandu dan kondisi sanitasi lingkungan.

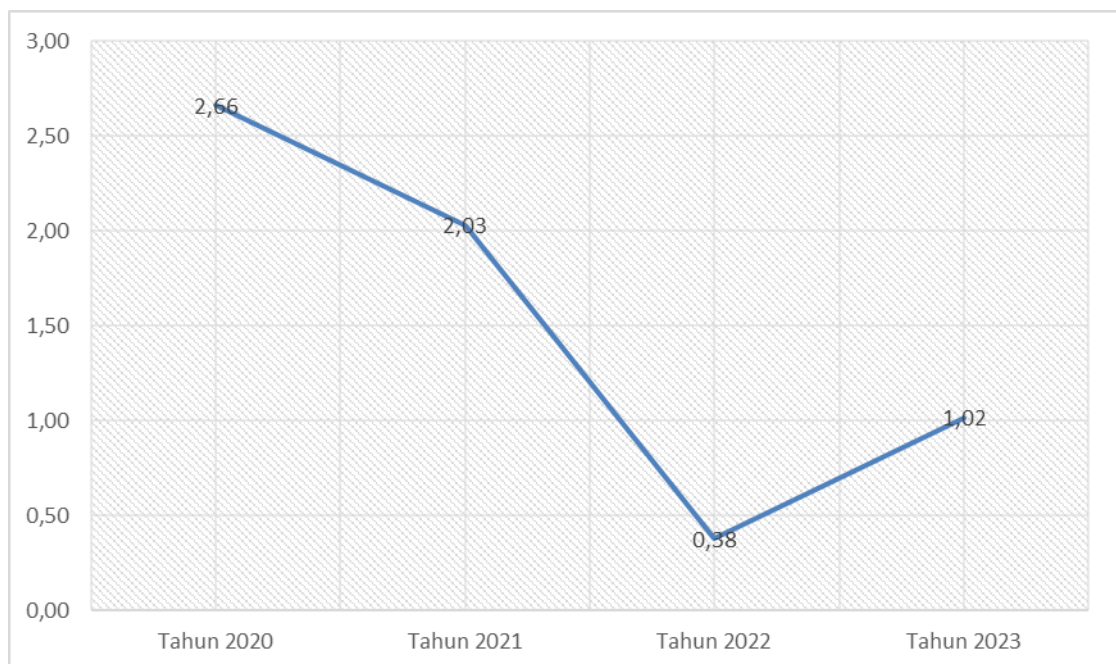
Penyebab AKABA di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak jauh berbeda dengan penyebab AKB. Untuk diketahui bahwa kasus kematian balita, dihitung berdasarkan kasus kematian balita usia 0-5 tahun, dimana kasus kematian bayi usia 0-1 tahun merupakan penyumbang terbanyak kasus kematian balita.

Dan upaya penurunan AKABA pun tidak dapat dipisahkan dari upaya penurunan AKB. Upaya-upaya yang telah dilakukan merupakan lanjutan

penurunan AKB ditambah beberapa upaya yang dilakukan untuk menurunkan AKABA seperti pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan pemantauan tumbuh kembang balita di posyandu melibatkan kader kesehatan, pemberian vitamin dan makanan tambahan pendamping ASI, serta pengaplikasian manajemen terpadu balita sakit (MTBS) di seluruh puskesmas, peningkatan sanitasi rumah dan lingkungan serta kerjasama dalam Program Pamsimas dalam kemudahan akses air bersih.

Angka Kematian Balita di tahun 2023 sebesar 1,02 per 1.000 kelahiran hidup meningkat dibandingkan tahun 2022 dimana Angka Kematian Balita pada tahun 2022 sebesar 0,38 per 1.000 kelahiran hidup. Perkembangan Angka Kematian Balita di Kabupaten Labuhanbatu Selatan periode 2020-2023 dapat digambarkan dalam grafik dibawah ini :

**Grafik Tren Angka Kematian Balita (AKABA)
di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 – 2023**



4. Prevalensi Gizi Kurang

Upaya perbaikan gizi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, serta dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Realisasi prevalensi Gizi Kurang yang dideteksi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2023 sebesar 1,08% dari target yang ditetapkan 7,0%, jika ditinjau dari capaian kinerja sudah tercapai 648,15%

yang dikategorikan dalam kategori Sangat Tinggi. Persentase target dan realisasi indikator sasaran prevalensi Balita Gizi Kurang dapat dilihat sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Kinerja	Kategori
Prevalensi Balita Gizi Kurang (%)	7,0	1,08	648,15	Sangat Tinggi

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu indikator sasaran prevalensi gizi kurang ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu, balita gizi kurang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar pada tahun 2022 sebesar 1,8%. Hal ini menunjukkan bahwa prevalensi kasus balita gizi kurang mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2023.

Faktor penyebab masih terjadinya gizi buruk dan kurang adalah implementasi program, partisipasi masyarakat untuk melakukan penimbangan masih kurang sehingga pemantauan pertumbuhan balita di wilayah tidak kurang optimal menyebabkan status balita yang membutuhkan intervensi tidak dapat ditindaklanjuti. Selain itu belum optimalnya dukungan lintas sektor menyebabkan belum sinergisnya upaya dan kegiatan dengan kelompok sasaran program yang sama.

Sedangkan upaya yang dilaksanakan dalam pemecahan masalah adalah meningkatkan akses balita ke pelayanan pemantauan pertumbuhan, mengoptimalkan peran serta masyarakat agar pemantauan balita dapat maksimal, penyuluhan gizi seimbang kepada masyarakat, pemerian bantuan stimulan PMT Pemulihan bagi balita gizi buruk serta memberikan pelayanan pemulohan balita gizi buruk dan kurang di Rumah pemulihan Gizi (RPG). Selain itu, adanya dukungan pendanaan APBD & DAK Non Fisik utk pelaksanaan kegiatan pembinaan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, tersedianya Sarana dan prasarana pelayanan gizi di Puskesmas.

5. Angka Kesakitan

Status kesehatan penduduk bisa dilihat dari tingkat kesakitan atau morbiditas. Tingkat kesehatan didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan atau mengalami sakit, dan mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-harinya dalam sebulan yang lalu. Jika dilihat menurut jenis kelamin, umumnya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun

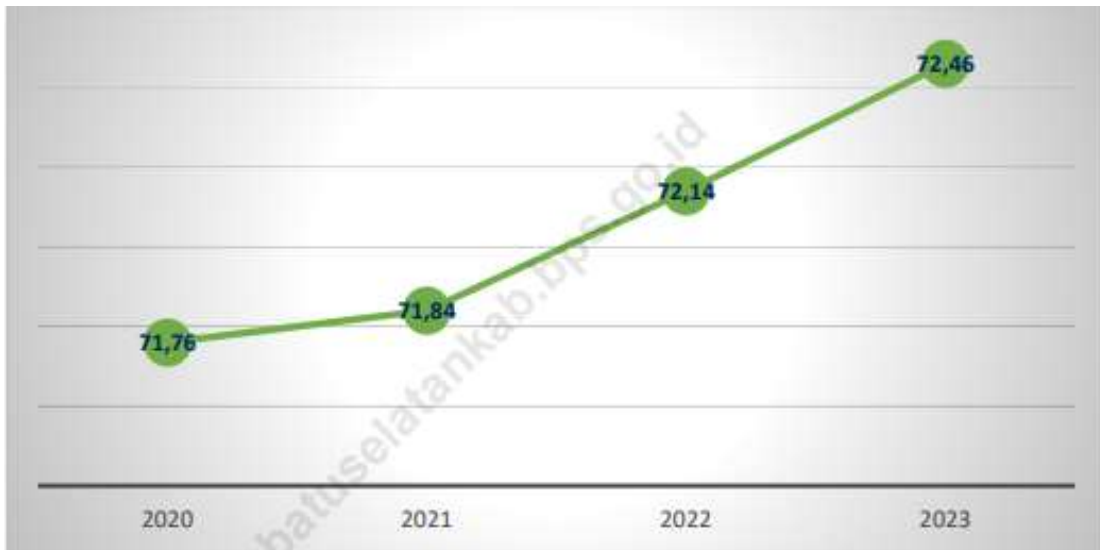
2023 perempuan lebih banyak menderita sakit dibandingkan laki-laki. Hal ini dapat dilihat pada Grafik dibawah ini

Tingkat Morbiditas Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2023



Secara umum, tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah juga dapat dinilai dengan melihat Umur Harapan Hidup (UHH) penduduknya. Angka ini sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara keseluruhan. Kebijakan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, sehingga sangat membantu memperpanjang angka harapan hidup penduduk. Di samping itu, adanya peningkatan taraf sosial ekonomi masyarakat memungkinkan penduduk untuk memperoleh perawatan kesehatan yang lebih baik sehingga dapat memperpanjang usia. Grafik 4.2 menunjukkan perkembangan UHH Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2020-2023



Umur Harapan Hidup 2023 mencapai 72,46 tahun, yang berarti bayi yang lahir tahun 2023, rata-rata akan hidup mencapai umur 72,46 tahun. Kecenderungan meningkatnya umur harapan hidup ini disebabkan membaiknya pelayanan kesehatan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi. Hal ini memungkinkan terjadinya perbaikan gizi, kesehatan dan lingkungan hidup yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan umur harapan hidup.

3.3. Realisasi Anggaran

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan tetapi berorientasi untuk mendorong perubahan dimana program/kegiatan dan sumber dana/ anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip akuntabilitas, untuk menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan fungsinya dalam penyediaan dan memberikan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Namun pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting untuk memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik dapat dicapai.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan didukung dengan dana/ anggaran belanja sebesar Rp. 108.085.061.499.- yang menurun dibandingkan dengan tahun 2022. Anggaran belanja terbagi ke dalam dua jenis belanja yaitu belanja operasi dan belanja modal. Alokasi tahun anggaran 2023 belanja operasi sebesar Rp. 99.640.061.417.- (92,19%) dan alokasi belanja modal sebesar Rp. 8.445.000.082.- (7,81%).

Realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp. 87.049.579.331.- atau 80,54% dari anggaran belanja dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 dengan realisasi belanja tahun 2022 sebesar 100.184.035.141 atau 74,16% dari anggaran belanja. Realisasi anggaran belanja tahun anggaran 2023 terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja operasi sebesar Rp. 79.737.497.240.- atau 80,03% dari jumlah anggaran operasi sebesar Rp. 99.640.061.417.- dan belanja modal sebesar Rp. 7.312.082.091.- atau 86,58% dari jumlah anggaran modal sebesar Rp. 8.445.000.082,-.

Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan mendapatkan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan dan Penerimaan Kapitasi JKN Puskesmas) dengan besaran realisasi pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp. 4.114.214.926.- (314,27%) dari target pendapatan tahun 2023 sebesar Rp. 1.309.123.768.- dan jika dibandingkan dengan tahun 2022 meningkat cukup signifikan dengan besaran realisasi pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp. 6913837000.- (86,18%) dari target pendapatan tahun 2022 sebesar Rp. 8.022.676.000.-

Rincian pendapatan dan belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2023 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut :



URAIAN	TAHUN 2023			TAHUN 2022		
	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
PENDAPATAN DAERAH	1.309.123.768	4.114.214.926	314,27	8.022.676.000	6.913.837.000	86,18
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.309.123.768	4.114.214.926	314,27	8.022.676.000	6.913.837.000	86,18
PENDAPATAN TRANSFER	-	-	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-	-	-
BELANJA DAERAH	108.085.061.499	87.049.579.331	80,54	135.089.957.106	100.184.035.141	74,16
BELANJA OPERASI	99.640.061.417	79.737.497.240	80,03	109.870.689.388	78.970.461.700	71,88
BELANJA MODAL	8.445.000.082	7.312.082.091	86,58	25.219.267.718	21.213.573.441	84,12
BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-	-	-
BELANJA TRANSFER	-	-	-	-	-	-

Adapun rincian belanja perprogram, kegiatan dan subkegiatan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Uraian Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		Total	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.032.757.681	45.171.057.901	90,28
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46.922.698.109	42.549.287.900	90,68
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.687.001.808	42.319.517.880	90,65
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	199.696.301	199.142.020	99,72
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.000.000	30.628.000	85,08
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	34.491.440	19.949.200	57,84
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	34.491.440	19.949.200	57,84
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	316.428.513	311.178.347	98,34
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	291.626.193	291.023.000	99,79
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	24.802.320	20.155.347	81,26
Administrasi Umum Perangkat Daerah	394.734.467	375.981.290	95,25
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.978.735	44.301.104	88,64
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.987.808	14.953.815	99,77
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.999.930	11.383.273	56,92
Fasilitas Kunjungan Tamu	9.981.994	7.136.800	71,50
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299.786.000	298.206.298	99,47
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	164.992.975	-	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	164.992.975	-	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.066.545.512	889.395.153	83,39
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.985.312	9.960.656	99,75

Uraian Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		Total	%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	496.160.200	355.034.497	71,56
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	560.400.000	524.400.000	93,58
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.132.866.665	1.025.266.011	90,50
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	883.944.665	823.564.511	93,17
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.060.000	101.883.500	68,35
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.862.000	99.818.000	99,96
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	55.426.249.850	32.061.852.967	57,85
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15.001.006.055	12.178.514.234	81,18
Pembangunan Puskesmas	550.000.000	550.000.000	100,00
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	539.626.000	483.594.000	89,62
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	383.391.000	377.682.000	98,51
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	149.967.000	-	0,00
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.578.279.579	4.032.150.000	88,07
Pengadaan Obat, Vaksin	5.161.253.167	4.563.983.509	88,43
Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.273.737.835	2.095.594.725	64,01
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	257.374.000	46.260.000	17,97
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	107.377.474	29.250.000	27,24
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.278.786.909	19.833.806.568	49,24
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.420.845.335	421.812.830	29,69
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	169.081.832	4.996.352	2,95
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	893.841.192	893.447.552	99,96
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.826.730.017	649.020.372	35,53
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	132.276.352	4.996.352	3,78
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	14.396.352	-	0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	46.119.476	4.500.000	9,76
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	4.950.000	4.050.000	81,82
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	4.950.000	4.950.000	100,00

Uraian Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		Total	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.670.000	1.800.000	18,61
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	313.720.000	6.600.000	2,10
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	52.139.613	-	0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	5.100.000	-	0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	43.460.000	43.200.000	99,40
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6.598.516.693	1.435.182.500	21,75
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	21.900.000	4.340.000	19,82
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	117.876.780	64.996.516	55,14
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	63.223.257	4.500.000	7,12
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	4.950.000	-	0,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	303.906.154	49.050.000	16,14
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.950.000	-	0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	10.090.000	4.500.000	44,60
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	221.974.718	114.430.800	51,55
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	707.492.159	47.928.868	6,77
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	9.434.208.000	9.137.539.600	96,86
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	45.449.819	44.099.819	97,03
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	25.420.546	8.338.000	32,80
Operasional Pelayanan Puskesmas	17.100.364.122	6.650.800.000	38,89
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	456.114.492	228.727.007	50,15
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	113.570.000	-	0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	111.500.000	-	0,00
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	146.456.886	49.532.165	33,82
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	146.456.886	49.532.165	33,82
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.639.478.759	168.075.222	10,25

Uraian Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		Total	%
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	129.558.358	67.440.937	52,05
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	45.307.253	15.501.267	34,21
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	84.251.105	51.939.670	61,65
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.509.920.401	100.634.285	6,66
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.509.920.401	100.634.285	6,66
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	62.139.869	17.100.000	27,52
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	9.645.274	5.550.000	57,54
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	9.645.274	5.550.000	57,54
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	20.638.716	-	0,00
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	20.638.716	-	0,00
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	10.120.000	4.800.000	47,43
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	10.120.000	4.800.000	47,43
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	21.735.879	6.750.000	31,05
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	11.247.868	3.750.000	33,34
Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	10.488.011	3.000.000	28,60

Uraian Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		Total	%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	924.435.340	399.620.723	43,23
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	269.992.850	250.000.000	92,60
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	269.992.850	250.000.000	92,60
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	322.833.385	149.620.723	46,35
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	286.794.200	147.792.723	51,53
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	36.039.185	1.828.000	5,07
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	331.609.105	-	0,00
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	331.609.105	-	0,00



BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan Capaian Kinerja

LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2023 ini menggambarkan kinerja dan evaluasi serta analisis terhadap kinerja yaitu berupa keberhasilan dan kegagalan yang dihadapi. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026 telah menetapkan 1 (satu) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai.

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat. Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2023 secara keseluruhan dinyatakan “sangat baik”, karena capaian rata-ratanya sebesar 345,18% dari target.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target diantaranya Angka Kematian Ibu dan angka kesakitan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pendidikan dan pengetahuan, sosial budaya, sosial ekonomi, geografi dan lingkungan, aksesabilitas ibu pada fasilitas kesehatan serta kebijakan makro dalam kualitas pelayanan kesehatan.

4.2 Langkah Strategis Penguatan Capaian Kinerja Masa Mendatang

Adapun langkah-langkah yang akan diambil untuk guna meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM Kesehatan melalui Pendidikan dan pelatihan teknis bidang kesehatan untuk tenaga kesehatan sesuai kebutuhan seperti, dokter, Tenaga Ahli Gizi, Apoteker, Analis Kesehatan, Atem, tenaga Administrasi dan

pengelolaan keuangan, sehingga dapat mengatasi masalah ketersediaan SDM Kesehatan yang bermutu.

2. Perbaiki pengelolaan perencanaan dengan melakukan cascade down sehingga program dan kegiatan dapat sinkron dan fokus untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi internal secara berkala (Triwulan) untuk mengukur sejauh mana proses pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan.
4. Meningkatkan koordinasi lintas program dan sektoral dengan melakukan pertemuan rutin dan juga perlu melibatkan masyarakat/memberdayakan masyarakat dalam setiap kegiatan pelayanan kesehatan.
5. Melaksanakan atau menerapkan Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan setiap kegiatan bagi Puskesmas yang belum memiliki SOP.
6. Pemetaan, penataan dan distribusi sumber daya manusia kesehatan sesuai rencana kebutuhan, jenjang jabatan dan kompetensi.
7. Pemenuhan sarana prasarana kesehatan yang dibutuhkan sesuai standar.
8. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat melalui gerakan hidup sehat dan meningkatkan mutu pelayanan kuratif dan rehabilitatif di sarana pelayanan masyarakat.





PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DINAS KESEHATAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Desa Sosopan, Kecamatan Kotapinang
Telp/Faks. 0624-95243, e-mail : dinkes.labuselkab@gmail.com
S O S O P A N

Kode Pos : 21464

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 305/440/DINKES/2024
T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2023**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023;
 - b. bahwa pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun LKIP di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
14. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 – 2026;
15. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2023**

KESATU : Mengesahkan Tim Penyusun LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini melaksanakan tugas secara penuh dalam menyusun LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 yang meliputi :

- a. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023;
- b. Mengkaji, menganalisis dan mengevaluasi capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023;
- c. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023;
- d. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya demi kesempurnaan LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023;
- e. Mencetak dan mendiseminasikan LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023; dan
- f. Melengkapi dokumen dalam rangka rewiu LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan di dalamnya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotapinang

Pada tanggal : 13 Januari 2024

**Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



dr. BAKTI SUHENDRI NASUTION

PEMBINA Tk. I/ IV/b

NIP. 19770618 201001 1 010

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023.
Nomor : 305/440/DINKES/2024
Tanggal : 13 Januari 2024

**SUSUNAN PEMBENTUKAN
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2023**

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Wakil Ketua : 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Sekretaris : Perencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Anggota : 1. Kepala Subbagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2. Kepala Subbagian Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
3. Staf Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

**Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**


dr. BAKTI SUHENDRI NASUTION
PEMBINA Tk. I/ IV/b
NIP. 19770618 201001 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DINAS KESEHATAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Desa Sosopan, Kecamatan Kotapinang
Telp/Faks. 0624-95243, e-mail : dinkes.labuselkab@gmail.com
S O S O P A N

Kode Pos : 21464

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 577/440/DINKES/2023
T E N T A N G
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2023**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan

b. bahwa dalam rangka meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH) untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berkualitas perlu dibuat Keputusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
14. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 – 2026;
15. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2023.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2023**

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan di dalamnya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotapinang
Pada tanggal : 10 Februari 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**


**dr. DONNY IRWANSYAH DALIMUNTHER, MKM
PEMBINA Tk. I / IV/b
NIP. 19760119 200502 1 001**

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang
 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 Nomor : 577/440/Dinkes/2023
 Tanggal : 10 Februari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan	Penjelasan		
					Defenisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Ibu	67	Per 100.000KH	Kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri.	$\text{Angka Kematian Ibu per 100.000 KH} = \frac{\text{Jumlah kematian ibu di suatu wilayah pada tahun tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada tahun yang sama}} \times 100.000$	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi	3,78	per 1000 KH	Kematian yang terjadi pada bayi usia 0 - 11 bulan tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri	$\text{Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup} = \frac{\text{Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada tahun tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada tahun yang sama}} \times 1.000$	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Balita	3,18	per 1000 KH	Kematian yang terjadi pada bayi/anak usia 0 - 59 bulan (bayi + anak balita) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri	$\text{Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup} = \frac{\text{Jumlah balita usia 0-59 bulan (bayi+anak balita) yang meninggal di suatu wilayah pada tahun tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada tahun yang sama}} \times 1.000$	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Balita Gizi Kurang	7	%	Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score kurang dari - 3 SD	$\text{Prevalensi balita gizi kurang} = \frac{\text{Jumlah balita gizi kurang}}{\text{Jumlah balita yang tidak berat badan dan panjang tinggi badan}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan
		Angka Kesakitan	11	%	Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari.	$\text{Morbiditas} = \frac{\text{Jumlah kasus baru penyakit atau penyakit dalam periode waktu tertentu}}{\text{Jumlah individu dalam populasi}} \times 100\%$	BPS Kab. Labuhanbatu Selatan

**KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



**dr. DONNY IRWANSYAH DALIMUNTHE, MKM
 PEMBINA Tk. I / IV/b
 NIP. 19760119 200502 1 001**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **dr. H. DONNY IRWANSYAH DALIMUNTHER, M.K.M**

Jabatan : **Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. EDIMIN**

Jabatan : **Bupati Labuhanbatu Selatan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

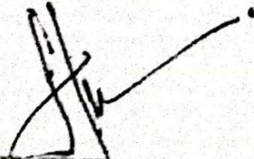
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotapinang,2023

Pihak Kedua,

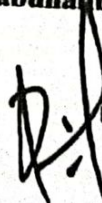
BUPATI LABUHANBATU SELATAN



H. EDIMIN

Pihak Pertama,

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan**



dr. DONNY IRWANSYAH DALIMUNTHER, MKM
Pembina Tk.I / IV b
NIP. 19760119 200502 1 001

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.488.710.106	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46.846.228.724	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.610.532.423	
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	199.696.301	
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	36.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	34.500.000	
	- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	34.500.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	316.513.173	
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	291.626.193	
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	24.886.980	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	987.223.157	
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	49.978.735	
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.987.808	
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.999.930	
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	9.981.994	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	892.274.690	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dae	164.992.975	
	- Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	164.992.975	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.066.545.512	
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.985.312	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	496.160.200	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	560.400.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dae	1.072.706.565	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	823.784.565	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.060.000	
	- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.862.000	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	55.532.833.627	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	16.407.112.131	
	- Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	987.626.000	
	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	143.820.000	
	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	149.967.000	
	- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.078.279.579	
	- Pengadaan Obat, Vaksin	4.334.229.717	
	- Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.337.090.835	
	- Pemeliharaan Rutin dan Berkal Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	257.374.000	
	- Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan lainnya	118.725.000	
	Penyediaan Layananan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.979.264.610	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	165.920.102	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.996.352	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.362.635.872	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	5.072.627	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	4.996.352	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	4.996.352	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	4.979.476	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hypertensi	4.950.000	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	4.950.000	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	7.650.000	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	46.800.000	

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	19.399.613
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	5.100.000
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3.328.744.485
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.672.963.530
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.060.000
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	64.996.780
- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	139.443.257
- Pengelola Pelayanan Kesehatan Tardisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4.950.000
- Pengelolaan Surveilans Kesehatan	59.586.154
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.950.000
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	4.950.000
- Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	221.974.718
- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.491.394.592
- Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat	9.368.284.800
- Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	45.449.819
- Operasional Pelayanan Puskesmas	25.160.546
- Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	16.507.355.646
-	391.553.537
Penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	146.456.886
- Pengelola Data dan Informasi Kesehatan	146.456.886

3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.794.734.192
- Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	107.659.392
- Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	45.307.253
-	62.352.139
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.687.074.800
- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.687.074.800

4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	9.645.274
-	9.645.274
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	20.638.716
- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	20.638.716
Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	10.120.000
- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan	10.120.000
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	21.735.879
-	11.247.868
- Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	10.488.011

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta

456.001.043

269.992.850

269.992.850

186.008.193

149.969.008

36.039.185

Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

- Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Se
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat

- Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat

Pihak Kedua,
Bupati Labuhanbatu Selatan



H. EDIMIN

Kotapinang,

2023

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Labuhanbatu Selatan



dr. DONNY IRWANSYAH DALIM

Pembina Tk.I / IV b

NIP. 19760119 200502 1 001

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2023

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output)	Satuan	Target		Rencana Kinerja Pada Triwulan				Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	I	II	III	IV	
1	Menurunnya angka kesakitan dan kematian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				50.032.842.341					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				46.922.698.109					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	557	46.687.001.808	557	557	557	557	Sekretariat
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	365	199.696.301	0	183	0	182	Sekretariat
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	36.000.000			3	2	Sekretariat
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					34.491.440				Sekretariat
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	10	34.491.440				5	Sekretariat
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					316.513.173				Sekretariat
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1007	291.626.193				1007	Sekretariat
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	70	24.886.980		34	34	40	Sekretariat
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					394.734.467				Sekretariat
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	49.978.735	0	6	0	6	Sekretariat
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	14.987.808	0	0,5	0	0,5	Sekretariat
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	19.999.930	0	0,5	0	0,5	Sekretariat
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	9.981.994	0	6	0	6	Sekretariat
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	299.786.000	0	12	12	12	Sekretariat
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					164.992.975				Sekretariat
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	163	164.992.975	0				Sekretariat
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.066.545.512				Sekretariat
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	9.985.312	0	6	0	6	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	496.160.200	0	6	3	3	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	560.400.000	2	4	3	3	Sekretariat
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.132.866.665				Sekretariat
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	56	883.944.665	0	56	56	56	Sekretariat
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	92	149.060.000	0	6	10	50	Sekretariat		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	99.862.000	0		2		Sekretariat		

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output)	Satuan	Target		Rencana Kinerja Pada Triwulan				Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	I	II	III	IV	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				55.426.249.850					
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				15.001.006.055					
		Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	1	550.000.000				1	Bidang Sumber Daya Kesehatan
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	1	539.626.000			0	1	Bidang Sumber Daya Kesehatan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	unit	7	383.391.000				7	Bidang Sumber Daya Kesehatan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	unit	1	149.967.000				1	Bidang Sumber Daya Kesehatan
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	paket	38	4.578.279.579			0	38	Bidang Sumber Daya Kesehatan
		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	2	5.161.253.167				2	Bidang Sumber Daya Kesehatan
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	3.273.737.835				1	Bidang Sumber Daya Kesehatan
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan dilakukan kalibrasi	Unit	157	257.374.000				50	Bidang Sumber Daya Kesehatan
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket	1	107.377.474				1	Bidang Sumber Daya Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				40.278.786.909					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	8895	1.420.845.335			40	5584	Bidang Kesehatan Masyarakat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	8490	169.081.832			40	5446	Bidang Kesehatan Masyarakat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	8086	893.841.192			40	7587	Bidang Kesehatan Masyarakat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	38952	1.826.730.017				21264	Bidang Kesehatan Masyarakat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	47302	132.276.352			40	39774	Bidang Kesehatan Masyarakat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	245973	14.396.352				141466	Bidang Kesehatan Masyarakat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	21150	46.119.476				17708	Bidang Kesehatan Masyarakat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	63483	4.950.000		12	0	12807	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5908	4.950.000		12		1664	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	521	9.670.000				462	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	7598	313.720.000				4539	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	9313	52.139.613				1700	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output)	Satuan	Target		Rencana Kinerja Pada Triwulan				Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	I	II	III	IV	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	5.100.000				1	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	1	43.460.000	0	0,5	0,25	0,25	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	6.598.516.693				1	Bidang Kesehatan Masyarakat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	21.900.000				1	Bidang Kesehatan Masyarakat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	117.876.780				1	Bidang Kesehatan Masyarakat
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	63.223.257				1	Bidang Kesehatan Masyarakat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1	4.950.000				1	Bidang Kesehatan Masyarakat
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	303.906.154				1	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	ORang	33	4.950.000				33	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	33	10.090.000				33	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	1	221.974.718			0	1	Bidang Pelayanan Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	707.492.159				1	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	9.434.208.000		0,5	0,25	0,25	Bidang Pelayanan Kesehatan
		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Orang	30648	45.449.819				30648	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	17	25.420.546				17	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	17	17.100.364.122		3	3	11	Bidang Pelayanan Kesehatan
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	6	456.114.492				6	Bidang Pelayanan Kesehatan
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	113.570.000				1	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Dokumen	1	111.500.000				1	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				146.456.886					
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	2	146.456.886		0,5		1,5	Sekretariat
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				1.639.478.759					
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				129.558.358					

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output)	Satuan	Target		Rencana Kinerja Pada Triwulan				Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	I	II	III	IV	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	orang	102	45.307.253			34	68	Bidang Sumber Daya Kesehatan
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	3	84.251.105				3	Bidang Sumber Daya Kesehatan
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.509.920.401					
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	153	1.509.920.401			119	34	Bidang Sumber Daya Kesehatan
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				62.139.869					
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				9.645.274					
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	1	9.645.274				1	Bidang Sumber Daya Kesehatan
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				20.638.716					
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	1	20.638.716				1	Bidang Sumber Daya Kesehatan
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				10.120.000					
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	1	10.120.000				1	Bidang Sumber Daya Kesehatan
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				21.735.879					
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	unit	25	11.247.868				17	Bidang Sumber Daya Kesehatan
		Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	dokumen	1	10.488.011				1	Bidang Sumber Daya Kesehatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				924.435.340					
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				269.992.850					
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dokumen	1	269.992.850		0		1	Bidang Kesehatan Masyarakat
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				322.833.385					

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output)	Satuan	Target		Rencana Kinerja Pada Triwulan				Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	I	II	III	IV	
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1	286.794.200				1	Bidang Kesehatan Masyarakat
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	Keluarga	200	36.039.185				17	Bidang Kesehatan Masyarakat
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				331.609.105					
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	331.609.105				0,5	Bidang Kesehatan Masyarakat

RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2024

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
					URAIAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	
Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian	1. Angka Kematian Ibu	65 Per 100.00KH	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kota	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	17	Unit	
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	4	unit	
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1	paket	
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	966	Unit	
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2	Paket	
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Paket	
	2. Angka Kematian Bayi	3,75 Per 1000KH			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7379	Orang
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7341	Orang
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7237	Orang
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34653	Orang
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	47302	Orang
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	214983	Orang
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21781	Orang
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	63483	Orang
3. Prevalensi Balita Gizi Kurang	6,80%				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5908	Orang	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	521	Orang	
4. Angka Kematian Balita	3,16 Per 1000KH								
5. Angka Kesakitan	10,00%								

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
					URAIAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7598	Orang
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9313	Orang
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	Dokumen
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	Dokumen
					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	Dokumen
					Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	Dokumen
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	33	Orang
					Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1	Dokumen
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	Dokumen
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	Dokumen
					Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	17	Paket
					Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Dokumen
					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17	Dokumen
					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2	Dokumen
					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	6	Unit
					Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	Laporan
					Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan GawatDarurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	Unit
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang denganTuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	400	Orang
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV(ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	25	Orang
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	Dokumen
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM BidangKesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	2	Dokumen

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
					URAIAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	
					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	Dokumen	
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegritas	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	2	Dokumen	
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	8	Unit	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1	Dokumen	
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	dokumen	
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	102	orang	
					Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3	Dokumen	
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	153	Orang	
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	Dokumen	
					Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1	Dokumen
					Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1	Dokumen

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
					URAIAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	Dokumen
				Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	Dokumen
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Dokumen
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	Dokumen
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	200	Keluarga
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	Dokumen

Kotapinang, Januari 2024
Pit. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan



dr. Bakti Suhendri Nasution
NIP. 19770618 201001 1 010